

# Buletin La'o Hamutuk

Vol. 3, No. 1

Pebruari 2002

**D**engan terbitan nomor ini, *Buletin La'o Hamutuk* memulai volume ketiganya. Sejak dua tahun yang lalu, kami meneliti dan menjelaskan beberapa institusi internasional yang aktif di Timor Lorosa'e, dan berusaha untuk membuat mereka lebih bertanggungjawab kepada rakyat di negara ini. Selama periode yang sama, berlangsung transisi dari kekuasaan PBB menuju kemerdekaan, dan Timor Lorosa'e akan merayakan kemerdekaan politiknya pada 20 Mei. Meskipun ada banyak persoalan, ini adalah pencapaian besar bagi rakyat Timor Lorosa'e dan bagi PBB.

Dalam *Buletin* ini kami meninjau dua bagian yang paling penting dari kehidupan masa depan Timor Lorosa'e: keamanan umum dan pertanian. Artikel utama kami menyoroti CIVPOL – pasukan polisi sipil internasional yang sudah berada di Timor Lorosa'e sejak sebelum referendum tahun 1999 dan akan tetap tinggal untuk beberapa tahun pertama kemerdekaan. Hubungan mereka dengan masyarakat dan dengan Dinas Kepolisian Timor Lorosa'e tidak baik, tetapi ada pelajaran untuk masa depan Timor Lorosa'e maupun misi PBB.

Perekonomian Timor Lorosa'e yang utama adalah pertanian, dan akan terus demikian dalam waktu dekat pada masa mendatang. Tulisan kedua kami meninjau Pusat Pelayanan Pertanian yang dikelola Bank Dunia, sebuah program percontohan yang telah berjalan dan bisa memainkan peran kunci dalam operasi petani. Dalam artikel yang terkait, kami juga membahas beberapa risiko yang terkandung dalam teknik-teknik pertanian non-organik, dan sejumlah alternatif yang kurang berbahaya dan lebih berkelanjutan.

Setelah sejumlah laporan dan berita pendek, *Buletin* ini diakhiri dengan sebuah artikel dan tajuk rencana tentang intervensi militer asing di Timor Lorosa'e di masa lalu – satu mengenai dukungan Amerika Serikat pada invasi Indonesia tahun 1975, dan yang lain mengenai pendudukan Jepang dari 1942 sampai 1945. Meskipun tidak ada permintaan maaf atau penutupan bagi kejahatan-kejahatan ini, kedua negara itu akan memiliki tentara lagi di Timor Lorosa'e tahun ini. ❖

## Tinjauan Mengenai Misi CIVPOL di Timor Lorosa'e

Setelah terjadinya kekerasan pasca referendum yang dilakukan oleh militer Indonesia dan para milisinya, Timor Lorosa'e mendapat bantuan tiga tipe pasukan keamanan internasional. Awalnya, InterFET (International Force in East Timor, Pasukan Internasional di Timor Lorosa'e) tiba. Sesudah 25 Oktober 1999, Pasukan Penjaga Perdamaian (PFF, Peace Keeping Force) dan Pasukan Polisi Sipil PBB (CIVPOL) dibentuk. Selama beberapa bulan kemudian, rombongan-rombongan dari dua kelompok ini berdatangan di Timor Lorosa'e. Pasukan Penjaga Perdamaian datang untuk melindungi penduduk dari milisi-milisi dukungan TNI dan memberikan keamanan nasional, sementara CIVPOL datang terutama untuk memelihara hukum dan ketertiban.

Sampai saat ini, misi Perserikatan Bangsa-Bangsa punya banyak masalah disiplin dalam komponen CIVPOL-nya. Beberapa dari persoalan ini sering terdapat di tubuh PBB dan berasal dari buruknya perekrutan dan pelatihan CIVPOL. Lainnya berkaitan langsung dengan kealpaan dan sikap ceroboh para petugas CIVPOL di Timor Lorosa'e. Selama dua tahun terakhir, penduduk Timor Lorosa'e menghadapi banyak masalah dengan petugas CIVPOL, dari

ketidackakapan dan ketidak bertanggungjawaan sampai pelanggaran berat hak asasi manusia (termasuk perkosaan).

Pada bulan Oktober 2001, Eirin Mobekk dari King's College di London mengeluarkan sebuah laporan berjudul 'Operasi Perdamaian Kepolisian: Polisi Sipil PBB di Timor Lorosa'e.' Artikel ini didasarkan pada informasi dalam laporan Mobekk, dan investigasi yang dilakukan oleh *La'o Hamutuk* di wilayah bagian timur.

(Melanjutkan di halaman 2)

### Di dalam . . .

Dicari peneliti .....	5
Amerika Serikat Memberi Izin Terhadap Invasi Tahun 1975 .....	5
Penilaian atas Proyek Percontohan Pusat Pelayanan Pertanian di Timor Lorosa'e .....	6
Sustenable Agrikultura Timor Lorosa'e .....	10
Berita Singkat .....	12
Reportajem Husi Konferensia Doadores iha Oslo ..	14
Mengapa Menolak Pasukan Bela Diri Jepang? .....	16

La'o Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e

P.O. Box 340, Dili, Timor Lorosa'e (via Darwin, Australia)

Kantor Baucau: +61(438)143724; lhaucau@easttimor.minihub.org

Mobile: +61(408)811373; Telepon: +670(390)325-013

Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org Web: <http://www.etan.org/lh>

Misi kepolisian terdiri dari dua bagian penting. Pertama adalah pembentukan dan pemeliharaan hukum dan ketertiban. Kedua pembentukan Dinas Kepolisian Timor Lorosa'e (East Timor Police Service yang kadang-kadang disebut Timor Lorosa'e Police Service). Di akhir 1999 dan awal 2000, lebih dari 1500 CIVPOL bersenjata dan tidak bersenjata ditempatkan di Timor Lorosa'e. Setelah Timor Lorosa'e mencapai kemerdekaan pada 20 Mei 2002, CIVPOL akan tetap berada di bawah komando seorang Komisaris Polisi dari luar negeri setelah sebagian besar komponen sipil internasional pergi. Diharapkan bahwa semua kegiatan pelatihan akademi dan tugas memelihara hukum dan ketertiban akan diserahkan ke Dinas Kepolisian Timor Lorosa'e dengan Komisaris Polisi Timor Lorosa'e, Paulo Martins, pada bulan Januari 2004.

Sekarang ini sekitar 1268 CIVPOL dari 41 negara berada di Timor Lorosa'e. Mereka sedang menjalankan dua komponen mandat yang disebutkan di atas. Para perwira CIVPOL menjalankan akademi kepolisian di Dili yang melatih para rekrutan Dinas Kepolisian Timor Lorosa'e. Tanggungjawab ini mereka jalankan bersama para instruktur Timor Lorosa'e. Dalam memelihara hukum dan ketertiban, struktur komando mencakup 13 Pusat Komando Distrik dan beberapa sub-stasiun di setiap distrik. Juga ada dua Unit Reaksi Cepat (Rapid Response Units): GNR (Guarda Nacional da República) dari Portugal di Dili dan satu kontingen Pasukan Polisi Khusus dari Yordania di Baucau. Di negara mereka masing-masing, dan di Timor Lorosa'e, kedua unit ini menjalankan 'tugas khusus' seperti mengendalikan kerumunan dan pengelolaan ketertiban umum.

### **Masalah-masalah Khusus**

Salah satu permasalahan yang cukup penting dengan CIVPOL adalah penerapan yang tidak konsisten dan tidak jelas konsep 'penertiban masyarakat' ('community policing'). Dalam kedua mandatnya – memelihara hukum dan ketertiban serta membentuk kepolisian Timor Lorosa'e – telah direncanakan sebuah model penertiban masyarakat. Pada dasarnya, penertiban masyarakat adalah sebuah sistem dimana masyarakat dan polisi bekerja sama untuk memelihara hukum dan ketertiban, dan menyelesaikan perselisihan. Di masyarakat-masyarakat Barat, agar penertiban masyarakat bisa efektif diperlukan dua syarat: pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketertiban. Keduanya tidak diterapkan secara efektif di Timor Lorosa'e setelah konflik. Lagi pula para perwira CIVPOL tidak mengetahui apa arti 'penertiban masyarakat' dan bagaimana implementasinya. Persoalan ini ditambah dengan kenyataan bahwa sistem kontrak CIVPOL bervariasi dari beberapa bulan sampai dua tahun. Mereka yang kontraknya sebentar sedikit insentifnya untuk menjalin persahabatan dengan masyarakat tempat mereka bekerja. Lagi pula, CIVPOL tidak berusaha untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal atau untuk memahami lebih baik beberapa persoalan yang ada di dalam masyarakat. Ketidakjelasan konsep penertiban masyarakat, dan kegagalan bekerjasama dengan

masyarakat dibuat lebih problematik lagi oleh masalah operasional di dalam CIVPOL.

Laporan Mobekk mengajukan secara garis besar beberapa kekurangan spesifik kemampuan CIVPOL untuk menerapkan polisi masyarakat masyarakat, yang secara mendasar dipantau oleh investigasi *La'o Hamutuk* di wilayah Timur. Persoalan persoalan ini dapat diringkas sebagai berikut:

### **Kurangnya Komunikasi yang Efektif**

Jelas bahwa kemampuan berkomunikasi dengan rakyat adalah sebuah unsur penting dari penertiban masyarakat. Sejak semula ini dihambat oleh penilaian PBB yang salah. Yang paling menonjol, tidak cukupnya penerjemah bagi CIVPOL membuat komunikasi menjadi sulit. Ini merupakan masalah di seluruh distrik, dan disebabkan oleh dua faktor kunci. Pertama, NGO internasional membayar dengan gaji yang lebih tinggi, sehingga penerjemah lebih suka bekerja untuk mereka; kedua, jumlah penerjemah tidak cukup dan ketika pendaftaran sipil dimulai bulan Maret 2001, PBB mengalihkan sebagian besar penerjemah ke bagian pendaftaran sipil, membiarkan CIVPOL tanpa penerjemah. Kekurangan penerjemah ini menyebabkan kebingungan di mana-mana. Dalam salah satu kasus CIVPOL menangkap korban bukan pelaku kejahatan; dalam kasus lainnya, CIVPOL hanya duduk dalam mobil mereka dan menonton sebuah kejahatan sedang berlangsung tanpa melakukan apapun sebab mereka tidak punya seseorang yang dapat berbahasa Indonesia, Tetum atau bahasa lokal yang lain. Contoh-contoh ini bukan kejadian yang terisolasi, tapi sering terjadi di seluruh negeri dan merupakan bukti kongkret dari kelemahan CIVPOL dalam hal penertiban masyarakat. Permasalahan terkait lainnya adalah kurangnya kemampuan perwira CIVPOL berbahasa Indonesia ataupun Portugis. Jika perhatian lebih diarahkan pada perekrutan perwira yang punya kemampuan itu maka kekurangan penerjemah mungkin kurang menjadi masalah. Memang, karena bahasa misi UNTAET adalah Inggris, kecenderungannya adalah merekrut perwira yang bisa berbahasa Inggris. Ini juga berlaku untuk perekrutan Dinas Kepolisian Timor Lorosa'e, orang Timor Lorosa'e yang bisa berbahasa Inggris yang lebih disukai.

Di Baucau, *La'o Hamutuk* berbicara dengan beberapa orang yang juga mengungkapkan persoalan-persoalan yang muncul karena kurangnya penerjemah. Sering ketika melakukan wawancara dengan korban, CIVPOL hanya berbahasa Inggris. Ketika CIVPOL menggunakan penerjemah, terjemahan sangat jelek sehingga orang bingung tentang apa yang sedang dibicarakan. Beberapa kali, mereka tidak yakin mengenai bagaimana melanjutkannya sebab CIVPOL kelihatan tidak memahami pokok persoalannya. Hal ini berkaitan dengan persoalan lain yang diangkat dalam laporan Mobekk: kurangnya kepekaan budaya.

### **Kurangnya pemahaman budaya dan politik**

Agar para polisi bisa bekerja efektif dengan masyarakat, mereka harus mengerti budaya masyarakat yang bersangkutan. Awalnya, PBB tidak menyediakan pelatihan yang cukup bagi CIVPOL tentang sejarah, budaya, dan



masyarakat Timor Lorosa'e. Banyak perwira CIVPOL mengatakan bahwa pelatihan selama satu minggu yang diberikan oleh PBB tidak memberikan pemahaman yang jelas tentang Timor Lorosa'e. Banyak polisi yang tidak tahu konteks sosial untuk operasi kepolisian yang mereka jalankan dan ini berakibat kurangnya komunikasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang baik dalam masyarakat, khususnya dalam berhubungan dengan perempuan Timor Lorosa'e. Ini merupakan kekurangan menyolok dari para pelatih PBB.

Selama pendudukan Indonesia di Timor Lorosa'e, polisi yang berada di bawah komando militer Indonesia melakukan kekejaman yang parah dan ini membuat orang umumnya tidak percaya kepada polisi. Oleh karena itu, CIVPOL harus ditatar tentang sejarah politik Timor Lorosa'e. Dengan menunjukkan pemahaman yang peka tentang budaya Timor Lorosa'e, CIVPOL akan lebih mendapat kepercayaan dari orang Timor Lorosa'e.

Di Baucau, banyak orang mengeluh bahwa polisi sering tidakpahaman pada budaya Timor Lorosa'e, tidak tahu tentang sejarah masyarakat. Ini memberikan sumbangan pada ketidakmampuan CIVPOL mengusut dan menyelesaikan kasus. Masyarakat di Baucau sadar bahwa CIVPOL tidak akan selalu menggunakan hukum adat Timor Lorosa'e, tetapi mereka beranggapan bahwa pemahaman tentang budaya Timor Lorosa'e akan membantu CIVPOL menjalankan keadilan dengan cara yang obyektif dan benar. Sebagai contoh, kadang-kadang CIVPOL membiarkan *liurai* menangani kasus, dan pada saat lain CIVPOL menangani kasus sendiri. Ini tidak konsisten, dan sering penduduk Baucau menjadi bingung apakah kasus mereka akan diselesaikan oleh CIVPOL atau dengan metode tradisional.

NGO lokal di Baucau menyatakan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat akan mengatasi sebagian dari kesalahpahaman ini.

Di Viqueque, perkelaian antara pelajar dua sekolah menengah pada tanggal 10 Maret 2001 meningkat selama tiga hari sehingga dua orang meninggal dunia dan kerusakan skala besar mengakibatkan 59 rumah terbakar dan lebih dari 400 orang kehilangan rumah. Meskipun kekerasan berasal dari persaingan lama antara kelompok-kelompok bela diri dari berbagai tempat di distrik itu, tindakan yang efektif dari polisi seharusnya bisa mengendalikan keadaan. Banyak persoalan yang disebutkan oleh pekerja NGO dan perwira Polisi Timor Lorosa'e, antara lain kurangnya koordinasi dan pemahaman mengenai keadaan oleh CIVPOL, kurangnya wewenang atau kepercayaan pada Polisi Timor Lorosa'e, kegagalan polisi melakukan intervensi secara efektif untuk membubarkan kelompok-kelompok yang melakukan pelemparan batu dan mencegah satu gerombolan yang datang memasuki kota, lambannya tanggapan dari Unit Reaksi Cepat Yordania yang berpangkalan di Baucau (tiba sesudah kerusakan berakhir), dan kurangnya kemampuan berbahasa dan penerjemahan (banyak penerjemah lari menyelamatkan diri karena takut polisi tidak dapat melindungi mereka).

### Hukum Yang Tidak Jelas

Ketentuan mengenai hukum mana yang digunakan itu membingungkan dan tidak memadai. Ketika para perwira CIVPOL tiba di Timor Lorosa'e, mereka dihadapkan pada tiga hukum yang sedang berjalan: 1) Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (yang diberlakukan oleh UNTAET untuk Timor Lorosa'e kecuali kalau bertentangan dengan standar

hak asasi manusia internasional; 2) Peraturan-peraturan PBB, termasuk Peraturan Transisi tentang Prosedur Pidana; dan 3) sejumlah hukum internasional termasuk Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat. Para perwira tidak mendapatkan pelatihan tentang isi hukum-hukum ini dan tidak tahu hukum yang mana yang digunakan pada saat tertentu. Karena ketidakjelasan ini CIVPOL kadang-kadang tidak melakukan apa-apa, tidak mau ambil risiko menerapkan hukum yang salah. Lagi pula, petugas CIVPOL kadang-kadang menggunakan hukum adat, tetapi sekali lagi dalam hal ini tidak ada konsistensi. Bahkan hukum adat kadang digunakan padahal tidak sesuai dengan masalahnya, seperti dalam kasus perkosaan di sebuah distrik dimana pelaku perkosaan diharuskan memberi kepada keluarga korban sembilan ekor kerbau. CIVPOL tidak menindaklanjuti kasus itu dengan perangkat hukum lain (CIVPOL dapat menyelidiki kejadian tersebut karena merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dan memprosesnya dengan Peraturan Transisi tentang Prosedur Pidana UNTAET). Lebih jauh, CIVPOL hadir pada acara adat itu, yang dengan demikian mengirim pesan kepada kaum perempuan Timor Lorosa'e bahwa kasus perkosaan tidak akan diselidiki secara resmi oleh CIVPOL.

Di Baucau, ada kebingungan yang sama. Orang-orang mengeluh bahwa mereka tidak diberitahu hukum mana yang akan digunakan oleh polisi pada suatu saat. Persoalannya bukanlah bahwa ada tiga sistem hukum yang berlaku, tetapi baik CIVPOL maupun masyarakat tidak tahu yang mana dari sistem tersebut yang berlaku untuk suatu kasus. Penerapan secara *ad hoc* hukum adat juga merupakan masalah, karena orang-orang di Baucau merasa bahwa ada ketidakadilan dalam sistem dan cara penerapannya.

Adanya persoalan komunikasi, kepekaan budaya, dan penerapan hukum berarti bahwa banyak kejahatan yang sudah diproses tidak diselesaikan. Di Baucau CIVPOL tidak menyelesaikan dua kasus kejahatan penting karena masalah yang disebutkan di atas. Kasus pertama adalah penyerangan Pastor Crispin di subdistrik Gariwai pada tanggal 19 Desember 2000. Pada kasus lainnya, sebuah mesjid dibakar pada tanggal 6 Maret 2001. Beberapa NGO lokal mengikuti kasus-kasus ini dan beranggapan bahwa kasus-kasus tersebut dapat diselesaikan jika polisi mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat.

## Kesimpulan

Banyak dari persoalan ini berasal dari kurangnya pelatihan dan sumberdaya, tetapi juga dari kurangnya komitmen PBB untuk mengembangkan dan menjalankan standar-standar ketertiban. Komisaris CIVPOL Peter Miller, orang Canada baru diangkat mengakui adanya persoalan-persoalan tersebut dan sedang berusaha membuat perubahan sejak tiba di Timor Lorosa'e pada bulan November 2001. Ia berpendapat bahwa PBB harus sungguh-sungguh melatih CIVPOL *sebelum* mereka ditempatkan, dan mencatat adanya beberapa perbaikan di bidang ini. Pelatihan akan ditekankan pada

bahasa dan komunikasi, kepekaan budaya dan hukum. Dengan pelatihan dan komitmen, beberapa insiden yang terungkap dalam laporan ini bisa dicegah. Lagi pula, Komisaris Miller merasa bahwa PBB harus lebih rajin dalam mengembangkan dan mempertahankan standar di antara perwira CIVPOL. Satu cara yang bisa dilakukan untuk mencapainya adalah jika PBB melakukan penilaian tentang kemampuan petugas CIVPOL sebelum mereka ditugaskan. Terlalu sering, masalah-masalah kontingen baru teridentifikasi setelah mereka tiba di Timor Lorosa'e dan karena alasan politik dan alasan ekonomi, pada umumnya mereka terus bertugas sesuai masa kontrak, dan bahkan kemudian ditugaskan misi-misi PBB berikutnya. Namun demikian, ada harapan terjadinya perubahan, yang ditimbulkan oleh tindakan Komisaris Miller baru-baru ini memulangkan sejumlah petugas CIVPOL yang baru tiba karena mereka tidak memenuhi standar kemampuan minimum. Lagi pula, PBB sudah mulai menggunakan tim penilai untuk penyaringan para calon CIVPOL, sehingga operasi polisi yang akan datang tidak akan menghadapi persoalan yang sama.

Orang Timor Lorosa'e membutuhkan pertanggungjawaban dan pasukan polisi yang adil, sekarang maupun di masa yang akan datang. Ini memerlukan pasukan polisi yang cakap, mampu membuat dan beroperasi dengan standar yang tinggi. Hal ini belum terjadi di Timor Lorosa'e. Contoh yang diberikan oleh banyak petugas CIVPOL tidak hanya mengecilkan hati penduduk sipil terhadap proses hukum dan ketertiban, tetapi juga memberikan citra yang negatif bagi Dinas Kepolisian Timor Lorosa'e yang sedang dibangun. Ketika CIVPOL tiba di sini, mereka datang untuk menjamin keamanan, stabilitas, dan perdamaian. Tetapi orang Timor Lorosa'e sudah dikecewakan. Diharapkan bahwa perubahan sikap baru-baru ini akan meningkatkan standar dan efisiensi CIVPOL di Timor Lorosa'e, sehingga masyarakat bisa mulai benar-benar mempercayai pasukan polisi mereka.

## Rekomendasi

Berdasarkan diskusi dengan sejumlah NGO lain, *La'o Hamutuk* menawarkan rekomendasi berikut ini kepada PBB untuk kelanjutan misi mereka di Timor Lorosa'e dan untuk misi polisi yang akan datang di seluruh dunia:

- CIVPOL perlu bekerja sama dengan masyarakat dalam menjelaskan peran dan tanggungjawab setiap kelompok di dalam konsep 'penertiban masyarakat.' Mereka juga perlu mendidik masyarakat tentang hukum yang mereka gunakan.
- CIVPOL perlu berusaha belajar bahasa Tetum atau bahasa lokal lainnya. Jika hal ini tidak praktis, administrasi CIVPOL perlu menjamin adanya penerjemah yang cakap selama 24 jam sehari.
- CIVPOL perlu dididik tentang tradisi, budaya, and kondisi sosial Timor Lorosa'e *sebelum* mereka tiba di Timor Lorosa'e.
- CIVPOL harus berkoordinasi dengan masyarakat lokal dan wakil-wakil mereka untuk membuka semua saluran informasi. ❖

## Dicari peneliti

*La'o Hamutuk* sedang mencari seorang staff internasional yang mempunyai kualifikasi dibidang berikut ini:

- Berpengetahuan yang baik tentang sejarah dan situasi terkini Timor Lorosa'e
- Peneliti dibidang keadilan social, politik, dan ekonomi dan bidang terkait lainnya.
- Memiliki keahlian yang baik dalam penulisan
- Berkemampuan Bahasa inggris, Indonesia atau Tetum
- Berkomitmen untuk berkerja dengan *La'o Hamutuk* di Timor Lorosa'e kurang lebih satu tahun

Wanita lebih khusus diinginkan untuk melamar, orang-orang dari Amerika Serikat tidak di anjurkan untuk melamar. Posisi pada kesempatan sekarang. CV dan surat-surat yang menyangkut kualifikasi diatas harus kirim ke kantor *La'o Hamutuk* PO Box 340, Dili East Timor or email [laohamutuk@easttimor.minihub.org](mailto:laohamutuk@easttimor.minihub.org).

Web: <http://www.etan.org/lh>

## Amerika Serikat Memberi Izin Terhadap Invasi Tahun 1975

Pada tanggal 7 Desember 2001, dalam peringatan hari penyerbuan Indonesia atas Timor Lorosa'e yang ke-26, para aktivis NGO meluncurkan dokumen pemerintah Amerika Serikat yang digolongkan lama, dimana membuktikan apa yang sudah diketahui banyak orang selama bertahun-tahun. Pemerintah Amerika Serikat diberitahu sebelumnya tentang rencana Indonesia dan disetujuinya pada tingkat tinggi. Informasi yang memuat transkrip tentang dua pertemuan pada tahun 1975 antara presiden Gerald Ford dengan Suharto yang dipublikasi secara umum oleh badan arsip keamanan nasional (sebuah NGO berbasis di Washington) dan diperolehnya dari Seni Kebebasan Informasi Amerika Serikat.

Pada bulan Juli Suharto mengunjungi Washington dan bertemu dengan sekretaris negara Henry Kissinger. Walaupun Timor Lorosa'e masih berada di bawah pemerintahan Portugese, presiden Indonesia mengatakan pada Amerika: '... satu-satunya jalan adalah mengintegrasikan ke Indonesia,' menjelaskan Fretelin sebagai 'unsur komunis.'

Karena Ford dan Kissinger mempersiapkan kunjungan kembali ke Jakarta, Kissinger menulis 'pokok-pokok pembicaraan' untuk Ford menindaklanjutinya 'Kami mencatat bahwa Indonesia telah menunjukkan keinginan untuk menggabungkan (Timor Lorosa'e) dengan Indonesia berdasarkan persetujuan masyarakat Timor. Hal ini akan muncul pada solusi yang beralasan.' Memo yang sama juga mengusulkan penggandaan bantuan militer Amerika Serikat ke Indonesia.

Ketika kedua presiden dan Kissinger bertemu di Jakarta pada tanggal 5 Desember, mereka sudah mengetahui (dari intelijen Amerika Serikat) tentang rencana Indonesia untuk segera menginvasi yang dirampungkan dua hari sebelumnya. Pada awal pertemuan itu, Ford sangat 'antusias' tentang pengembangan M-16 di Indoensia. Setelah itu, presiden

Indonesia mengangkat isu Timor Lorose dengan mengatakan 'Kami menginginkan pengertian anda, jika kami menganggap perlu untuk melakukan tindakan cepat atau dramatik.' Ford memberikan jawaban: 'Kami akan mengerti dan kami tidak akan menekan anda atas isu itu. Kami mengerti permasalahan dan keinginan yang anda miliki.'

Walaupun Kissinger mengatakan bahwa 'pengunaan senjata-senjata Amerika Serikat dapat menimbulkan permasalahan' kedua ofisial Amerika yakin permasalahan dapat diselesaikan terlebih jika penyerbuan itu ditunda sampai Ford kembali ke Amerika Serikat. Tetapi jika Indonesia tidak bisa menunggu, Kissinger mengatakan: 'Jika anda sudah membuat perencanaan, kami akan membuat semampu kemamyuan kami untuk orang-orang tidak mengetahuinya sampai presiden kembali.' Kinssinger menayakan jika Suharto mengantisipasi 'perang gerilya yang panjang' kemudian presiden Indonesia menjawabnya 'mungkin masih ada sedikit perang gerilya' dua hari kemudian Indonesia memulai melakukan penyerbuannya (Ford dan Kissinger berada di Phillipina) dengan menggunakan beberapa persenjataan berat dari Amerika Serikat. Enam bulan kemudian, menurut dokumen lain yang baru diluncurkan, ofisial-ofisial departemen negara Amerika Serikat menyetujui 'kami sudah menyimpulkan semua norma-norma hubungan kita dengan (Indonesia); dan tidak ada masalah yang tersangkut.' Akhirnya terjadilah sejarah berdarah.

Komentar *La'o Hamutuk*: *Kami mengulangi tuntutan kami untuk mengadili orang-orang cipil dan perwira-perwira militer dari negara mana saja yang bertanggung jawab atas tindakan kejahatan mulai dari tahun 1975 sampai 1999. Ketiga ofisial dan juga bawahan-bawahan dan penganti-pengantinya ini harus dipertanggungjawabkan.* ❖

# Penilaian atas Proyek Percontohan Pusat Pelayanan Pertanian (Pilot Agricultural Service Centers) di Timor Lorosa'e

Timor Lorosa'e di bawah administrasi PBB, menghadapi banyak tantangan dalam membangun kembali bangsa setelah kekerasan dan penghancuran oleh milisi pro-Indonesia dan TNI di tahun 1999. Hampir 70% infrastruktur fisiknya dihancurkan, termasuk sebagian besar sektor pertaniannya. Fasilitas pertanian, seperti mesin pengolahan pangan, ternak, bibit dan rumah-rumah petani dihancurkan. Pasar di desa-desa belum pulih seperti masa sebelum referendum, yang berakibat berkurangnya akses bagi barang-barang seperti pupuk, pestisida, bibit dan obat-obatan.

Bulan November 1999 wakil-wakil Bank Dunia, UNTAET dan CNRT mengadakan Misi Penilaian Bersama (Joint Assessment Mission) yang mengidentifikasi prioritas rekonstruksi bagi Timor Lorosa'e. Salah satunya adalah rehabilitasi dan pembangunan sektor pertanian. Penilaian ini menjabarkan fase pertama dari Program Rehabilitasi Pertanian, yang dikenal dengan sebutan ARP I, yang sedang berlangsung. Bulan Maret dan April 2001, sebuah Misi Donor Bersama (Joint Donor's Mission) merumuskan rencana bantuan lanjutan bagi sektor pertanian ini. Rekomendasi dari misi ini dimasukkan dalam fase kedua Program Rehabilitasi Pertanian, atau ARP II, yang akan dimulai pertengahan 2002. Artikel ini memuat keterangan tentang tujuan-tujuan utama dari Proyek Rehabilitasi Pertanian dan juga merinci salah satu unsurnya, yakni Proyek Percontohan Pusat Pelayanan Pertanian (Pilot Agricultural Service Centers atau PASC).

Investigasi yang dilakukan *La'o Hamutuk* tahun 2000 menemukan sejumlah masalah serius dalam rencana yang diusulkan. Ini termasuk kurangnya konsultasi dengan masyarakat tentang pembangunan sektor pertanian (lihat *Bulletin La'o Hamutuk*, Vol. 1, No. 4). Walaupun Bank Dunia sudah menerbitkan kerangka bagi fase kedua ARP ini, yang antara lain menjabarkan 'pelajaran-pelajaran' dari fase pertama, tetap saja ada masalah dalam pendekatan Bank Dunia terhadap sektor pertanian. Salah satu masalah terbesar adalah dorongan untuk menggunakan ekonomi 'pengguna membayar' (*user pays*), di mana petani membeli barang dan jasa (traktor, pupuk dan bibit) dengan harga pasar dan menjual langsung produknya ke pasar (konsumen dan pedagang).

Salah satu peran Bank Dunia di bawah pemerintahan transisi UNTAET ini adalah mengelola dana dari donor internasional melalui Trust Fund for East Timor (TFET) dan memberi sumbangan untuk proyek-proyek tertentu dari dananya sendiri (lihat *Bulletin La'o Hamutuk*, Vol. 1, No. 4). Rehabilitasi sektor pertanian adalah salah satu proyek terbesar yang diawasi Bank Dunia di Timor Lorosa'e. Staf internasional bekerjasama dengan staf Timor Lorosa'e di Kementerian Pertanian dan Perikanan ETPA (East Timor Public Administration), untuk mencapai tujuan-tujuan proyek ini.

Misi Penilaian Bersama (Joint Assessment Mission atau JAM) waktu itu membuat kerangka kerja dengan empat butir bagi ARP:

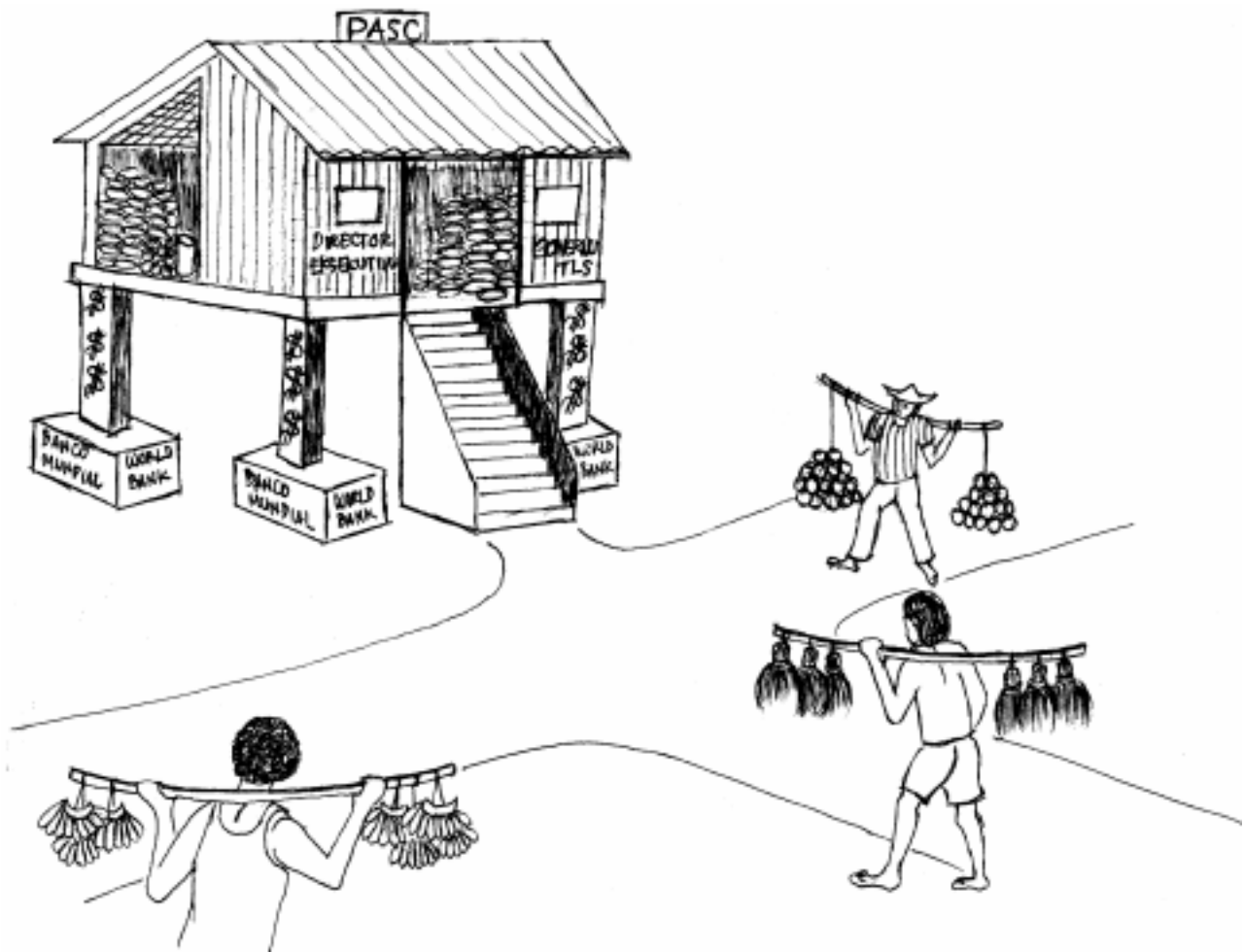
- Prioritas pembangunan kembali jangka pendek yang terarah pada peningkatan keamanan pangan, peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pertumbuhan di desa-desa.
- Fase rehabilitasi terpusat pada pengembalian aset, persediaan, infrastruktur dan peralatan yang hilang.
- Fase transisi akan membentuk landasan bagi pembangunan berkelanjutan di sektor itu.
- Fase pembangunan berkelanjutan akan terarah pada keberlanjutan jangka panjang dari sektor pertanian.

Keseluruhan dana untuk ARP ini mencapai US\$17,8 yang berasal dari TFET dengan tambahan kecil dari Consolidated Fund for East Timor (CFET). Di samping itu, berbagai seksi pendukung di Kementerian Pertanian ETPA, seperti unit pemetaan, mendapat dana dari bantuan bilateral yang langsung sifatnya, seperti dari Australia dan Jepang. Untuk mencapai empat butir rencana yang diuraikan di atas, ada dua fase ARP yang diusulkan. Fase pertama, senilai US\$5,42 juta, yang akan selesai bulan Juni 2002 dan termasuk pengembalian aset (kerbau dan ayam), irigasi dan rehabilitasi jalan, serta peluncuran PASC.

ARP fase kedua dimulai November 2001 dan akan berlangsung sampai Desember 2003. Total dana yang tersedia adalah \$8,9 juta, dengan \$8 juta dari TFET, serta \$0,9 juta dari CFET (lihat tabel di bawah).

**Tabel: Proyek Rehabilitasi Pertanian – Fase 2 (ARP II)**

Kegiatan	Rincian	Dana
Proyek percontohan pembangunan partisipatoris dan pengelolaan sumber daya alam	Pemilihan desa percontohan, pelatihan, bantuan untuk proposal dari masyarakat	\$0,9 juta
Rehabilitasi infrastruktur	Irigasi berbasis komunitas, rehabilitasi, rehabilitasi berbasis komunitas untuk jalan, pembentukan perkumpulan pengguna air, pelatihan irigasi	\$2,7 juta
Pelayanan Petani	Menciptakan pelayanan kesehatan ternak yang berkelanjutan, dan proyek percontohan pusat pelayanan petani (PASC)	\$3,1 juta
Managemen Proyek	Pengembangan kebijakan dan strategi, managemen proyek	\$2,2 juta



Berdasarkan penilaian Bank Dunia atas fase pertama ARP, ada beberapa pelajaran yang bisa ditarik, dan akan dimasukkan dalam fase berikutnya. Pertama, disadari bahwa pembagian ternak dan alat-alat tangan ternyata sulit dan seringkali membuat orang pulang dengan tangan kosong atau kecewa dengan apa yang mereka terima, dan akhirnya menambah ketimpangan di kalangan petani sendiri. Walaupun daftar penerima sudah disusun setelah konsultasi yang intensif dengan petani, Petugas Pertanian Distrik dan kelompok perempuan serta gereja, keputusan akhir mengenai distribusi diambil di Dili, jauh dari tempat tinggal para petani itu. Di samping itu juga ada masalah kualitas alat-alat tangan yang dibagikan. Banyak di antaranya rusak walau baru dipakai sebentar saja.

Kedua, ada masalah dengan definisi Bank Dunia dan Kementerian (kemudian Departemen) Pertanian mengenai kemiskinan. Dalam panduan yang disepakati oleh kedua lembaga ini, petani bisa mendapat kompensasi hanya jika kerbau dan ternak mereka mati sewaktu terjadi kekerasan tahun 1999. Hal ini berarti petani yang hanya punya sedikit atau bahkan tidak punya ternak sama sekali di zaman pendudukan Indonesia tetap saja miskin di bawah UNTAET. Terakhir, adalah masalah-masalah dengan kehadiran PASC sendiri.

Pembentukan PASC sebenarnya merupakan bagian dari ARP I; tapi nyatanya baru sekarang ini pusat-pusat pelayanan pertanian itu didirikan. Menurut penilaian atas fase pertama APR, Kementerian (kemudian Departemen) Pertanian menghadapi banyak masalah dalam tahap-tahap awal

pembentukan PASC ini. Beberapa di antaranya berkaitan dengan latar belakang budaya dan sejarah masyarakat petani di Timor Lorosa'e, dan lainnya berkaitan dengan rancangan serta metode pelaksanaan PASC itu sendiri.

### **Proyek Percontohan Pusat Pelayanan Pertanian (PASC)**

PASC adalah pendekatan yang relatif baru dalam pembangunan pertanian yang diusulkan Bank Dunia, tapi dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ETPA. Konsep ini didanai oleh Bank Dunia dan dilaksanakan oleh sejumlah ahli asing yang pernah bekerja untuk proyek-proyek serupa di Meksiko, El Salvador, Honduras, Tajikistan dan Namibia. Brosur informasi ARP menggambarkan PASC ini sebagai berikut: 'PASC ini bukanlah proyek; namun sebuah usaha dagang. Badan ini adalah kegiatan bisnis yang dirancang untuk menghasilkan uang atau mencari keuntungan. Badan ini dapat memberikan barang, persediaan dan pelayanan yang diminta oleh petani.' Program ini oleh petani di distrik tertentu yang ingin menjalankan bisnis komersial, yang disebut PASC. Perusahaan ini awalnya dibiayai dari dana TFET yang dikelola oleh Bank Dunia, tapi akhirnya akan menjadi bisnis yang bisa berjalan sendiri. PASC berpijak pada sistem pertanian yang tidak diberi subsidi, di mana petani akan bekerja dalam sistem pasar bebas, menjual produk mereka sesuai harga pasar. Di samping itu PASC dirancang untuk 'memiliki' serta menyewakan alat-alat yang diperlukan petani, seperti traktor, pupuk dan pelayanan perawatan ternak.

### **PASC Maliana, Bobonaro**

PASC di Maliana terkonsentrasi pada produksi beras untuk pemasaran lokal dan telah didanai dengan dana awal US\$350.000 dari TFET. Anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan berikut ini:

- √ Pupuk, benih dan peralatan-peralatan (US\$ 50.000)
- √ Pembangunan kantor (US\$100.000)
- √ Transportasi (US\$100.000)

Gaji untuk manajer PASC di Maliana adalah US\$300 per bulan, gaji akuntan US\$85 per bulan, dan gaji penjual \$75 per bulan. Gaji untuk staf PASC berdasarkan kualifikasi dan pengalaman.

### **PASC Aileu dan Viqueque**

PASC di Viqueque akan memusatkan pada kelapa dan kemiri, dan juga proyek ini didanai dengan dana (hibah) awal sebesar US\$350.000 dari TFET. PASC di Aileu akan memusatkan pada produksi kopi, dan didanai dengan dana hibah sebesar US\$80.000 dari TFET. Kedua PASC tersebut juga akan menjual dan mendistribusikan peralatan pertanian. Sampai sekarang, belum ada informasi terperinci mengenai kedua PASC ini. Kurang jelas mengapa PASC tertentu mendapat dana hibah pertama yang lebih besar. Ketika ditanya tentang hal ini, penasihat internasional di Kementerian Pertanian mengata bahwa kadang-kadang anggaran dapat berubah, tapi dia merasa yakin bahwa PASC yang dana hibah pertamanya lebih kecil akan bisa mendapat dana hibah cukup besar dari sumber-sumber lain dalam anggaran Proyek Rehabilitasi Pertanian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatannya.

Sebuah dewan direksi, yang terdiri atas wakil-wakil gereja, kelompok perempuan, masyarakat sipil, pemimpin tradisional dan kalangan bisnis, dan wakil dari setiap sub-distrik, menjadi pemimpin PASC ini. Petugas Pertanian Distrik juga duduk dalam dewan direksi ini. Seorang manajer bertugas mengatur pekerjaan harian dari PASC sementara akuntan menangani masalah keuangan, dan seorang petugas pasar menangani masalah distribusi. Semuanya adalah orang Timor dan mereka berasal dari daerah di mana PASC itu didirikan. Untuk membantu tahap awal pengoperasian ini, seorang penasihat internasional ditunjuk membantu PASC Bobonaro. Penunjukan ini dilakukan oleh Kementerian Pertanian, dan harus mendapat persetujuan dari Bank Dunia (lihat kotak rincian gaji PASC Bobonaro). Para 'anggota' PASC ini terdiri atas dewan eksekutif (manajer, akuntan dan petugas pasar), anggota (petani yang mendaftar), dan seorang penasihat (ahli asing). Agar bisa berjalan setiap PASC paling tidak memiliki anggota 3.500 anggota. Keanggotaan bersifat cuma-cuma dan terbuka bagi setiap orang.

Namun pelayanan yang diberikan PASC tidak cuma-cuma dan semua anggota harus membayar untuk mendapat pupuk atau meminjam traktor. Harga untuk setiap pelayanan ditentukan oleh dewan direksi PASC dan karena itu bisa berbeda di masing-masing distrik.

Bank Dunia mengusulkan pembentukan enam PASC di Timor Lorosa'e, tapi sampai sekarang hanya tiga (Bobonaro, Aileu dan Viqueque) yang mulai beroperasi. Awalnya ada sepuluh distrik yang dianggap potensial sebagai lokasi PASC, dan mendapat tugas 'pembentukan' PASC. Petugas Pertanian Distrik menghimpun kelompok diskusi di tingkat sub-distrik dan distrik untuk membantu petani dalam kegiatan 'pembentukan' ini. Setelah membuat penilaian bagi kegiatan di semua distrik, hanya Bobonaro, Viqueque dan Aileu yang terlihat cocok untuk pelaksanaan PASC. Ada tiga PASC lain yang akan dibentuk setelah ada penilaian (dan perubahan

seperlunya) terhadap tiga yang sudah dibentuk sebelumnya, mungkin di tahun 2003.

Menurut penasihat internasional bagi PASC di Kementerian Pertanian ETPA, proses pembentukan PASC bersifat partisipatoris di semua tingkat. Awalnya Petugas Pertanian Distrik membentuk kelompok diskusi di tingkat sub-distrik untuk bertemu dengan petani. Dalam tahap ini, konsep dan struktur PASC dijelaskan kepada petani, yang kemudian memutuskan apakah mereka ingin menjadi anggota atau tidak. Kalau jumlah anggota minimum yaitu 3.500 orang sudah tercapai, maka dewan direktur sementara akan diangkat oleh anggota dan Kementerian Pertanian. Kelompok diskusi itu akan membantu petani untuk mengidentifikasi jenis tanaman yang ingin mereka tanam, dan pelayanan seperti apa (traktor, alat tangan, bibit dan pupuk) yang mereka perlukan. Para petani di tingkat sub-distrik akan membuat rencana bisnis bagi PASC, dan mengirimkannya kepada dewan direktur sementara. Dewan itulah yang akan menyesuaikan berbagai rencana yang mereka terima dari setiap sub-distrik. Jika proses ini selesai, maka dewan akan mengirim proposal akhir kepada kantor PASC di Kementerian Pertanian di Dili. Kantor itulah yang akan menilai proyek tersebut. Jika dinilai baik, maka proposal akan dikirimkan kepada Bank Dunia untuk mendapat persetujuan. Jika kantor itu merasa masih ada masalah dengan proposal itu, maka mereka akan berunding dengan konsultan di Bank Dunia, yang akan pergi ke distrik dan membicarakan perubahan-perubahan yang diperlukan. Jika dewan di tingkat distrik, Bank Dunia dan Kementerian Pertanian sudah menyetujui proposal itu, maka PASC akan dijalankan, dan manager serta akuntan pun akan segera diangkat. Menurut penasihat internasional di Kementerian Pertanian, proposal-proposal itu akan diterjemahkan ke bahasa yang sesuai agar semua anggota PASC bisa memahami strukturnya.



## Masalah-Masalah

Masalah utama dengan PASC dapat ditelusuri kembali ke pelaksanaan ekonomi pasar oleh Bank Dunia di sebuah sektor yang sangat sedikit pengalamannya dengan bentuk pertukaran semacam itu. Secara tradisional petani Timor Lorosa'e tidak hidup dalam ekonomi yang menggunakan uang. Mereka cenderung menggunakan bentuk pertukaran non-moneter, seperti barter. Di samping itu, mengingat sejarah kolonialisme Portugis dan pendudukan Indonesia, petani Timor Lorosa'e sangat berhati-hati. Artinya petani sulit menerima begitu saja konsep yang belum diuji dan dibawa serta dilaksanakan oleh pihak asing. Dari segi ini, muncul pertanyaan tentang baik tidaknya memperkenalkan program PASC ini di Timor Lorosa'e.

PASC dijalankan sebagai bisnis karena kebijakan Bank Dunia yang jelas-jelas berorientasi pada pasar besar. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kemampuan PASC untuk membantu petani. Misalnya saja, seorang petani datang ke kantor PASC dengan harapan bisa menjual kelebihan padi yang ditanamnya. PASC akan menjual padi itu ke pasar, tapi PASC juga perlu menutup pengeluaran dan mencari untung sekaligus, sehingga akan ada perbedaan antara harga beli dan harga jual. Jika PASC ingin mendapat untung banyak, maka harga beli padi itu akan lebih rendah dari harga jualnya. PASC akan menyimpan uang dari selisih jual-beli ini. Petani akan mendapat pemasukan karena menjual kelebihan padinya, tapi pendapatan ini ditentukan oleh pasar, dan juga dari kebutuhan PASC untuk menjalankan kegiatan yang memperoleh untung. Jadi, kepentingan petani sesungguhnya berada di bawah kepentingan PASC untuk menutup pengeluarannya dan juga mempertahankan (atau bahkan meningkatkan) keuntungannya. Walaupun petani tidak wajib menjual hasil kerjanya kepada PASC, infrastruktur pertanian dan pemerintah serta pasar digerakkan untuk mendukung PASC, dan karena itu bisa memperkecil ruang gerak petani untuk menjual produknya kepada pihak lain. Jika keuntungan PASC meningkat, apa yang akan terjadi pada petani?

Secara teoretik, petani inilah 'pemilik' dari PASC; semua keuntungan yang diperoleh PASC adalah milik petani sendiri. Uang ini bisa dipakai untuk banyak hal – untuk membayar kembali petani sebagai bentuk pendapatan atau membangun gudang produk yang bisa dipakai semua petani. Namun, PASC sampai sekarang belum menetapkan mekanisme distribusi keuntungan tersebut. Sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan demokratis untuk membangikan uang diperlukan di sini, untuk memastikan bahwa keuntungan memang akan kembali kepada petani. Tidak adanya rencana yang jelas mengenai pembagian ini akan menimbulkan masalah, karena seolah-olah pendapatan petani itu meningkat padahal tidak ada perkembangan yang berarti dalam kehidupan mereka.

Misalnya, PASC bisa mendapat untung dalam setahun. Menurut panduan PASC, uang ini adalah milik semua anggota PASC, artinya petani. Namun, jika tidak ada metode yang jelas untuk memastikan bahwa semua petani punya

akses yang sama terhadap uang itu, maka 'keuntungan' ini hanya berlaku di atas kertas, dan tidak akan jatuh ke tangan petani.

Terlepas dari arti PASC yang masih bisa diperdebatkan, ada sejumlah masalah lain dalam pelaksanaannya. Struktur PASC sangat membingungkan dan menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, kenapa ada PASC yang menerima lebih banyak bantuan dari Bank Dunia ketimbang PASC yang lain? Tindakan apa yang diambil untuk memastikan bahwa PASC dijalankan dengan cara melibatkan orang dan dapat dipertanggungjawabkan? Brosur informasi ARP mengatakan bahwa 'keanggotaan PASC bersifat terbuka bagi semua penduduk yang terlibat dalam pertanian.' Bagaimanapun ada laporan-laporan dalam sebuah sub-distrik di mana aliansi politik mempengaruhi kelompok diskusi sehingga memberlakukan diskriminasi terhadap anggota masyarakat tertentu yang ingin bergabung dalam PASC. Di samping itu PASC juga sangat sentralistik, dan hanya ada di kota-kota besar di distrik. Ini artinya anggota masyarakat yang tinggal di kota-kota besar lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan PASC ketimbang orang yang tinggal di sub-distrik.

Menurut mantan penasehat Kementerian Pertanian, juga ada masalah produksi dan penyimpanan produk yang berlebih. Penjualan produk yang berlebih adalah salah satu jalan utama bagi PASC untuk mencari untung dan kemampuan finansialnya. Setelah penghancuran September 1999, sungguh sulit bagi petani untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat dasar. Dengan memproduksi tanaman untuk dijual, agar bisa menjamin keberhasilan finansial PASC 'milik' mereka, sebenarnya petani mendapat beban tambahan padahal sudah bekerja luar biasa keras. Lagipula, sekalipun surplus ini berhasil dicapai petani, sekarang ini masih sulit menyimpan dan mengirim produk itu ke pasar. Penasehat itu mencatat bahwa di masa lalu, kelebihan beras ternyata rusak dimakan tikus karena tidak ada fasilitas penyimpanan yang memadai.

Investigasi ini mengungkap bahwa masih banyak masalah di sekitar pelaksanaan PASC di Timor Lorosa'e. Walaupun Bank Dunia sudah mengeluarkan banyak uang untuk merehabilitasi salah satu sektor terpenting di Timor Lorosa'e, sebenarnya visi mereka tentang rehabilitasi patut dipertanyakan. Aspek budaya dan ekonomi dalam melembagakan sistem 'pengguna membayar' dalam masyarakat yang belum terbiasa, berbarengan dengan pelaksanaan sistem yang lemah, tentu bukan dasar yang baik bagi keberlanjutan struktur PASC. Di samping itu, tetap tidak jelas bagaimana petani dapat meningkatkan pendapatan mereka secara baik dan lancar. Lebih penting lagi, di bawah sistem PASC kehidupan petani akan sangat bergantung dan rentan pada harga pasar, kualitas fasilitas penyimpanan serta kemampuan PASC untuk membawa produk mereka ke pasar. Jika harga pasar turun, atau produk petani dimakan tikus, atau transpor untuk membawa produk itu tidak cukup, maka petani yang harus menanggung bebannya, bukan usaha dagang yang disebut 'PASC' ini. ❖

# Sustenabilidade Agrikultura Timor Lorosa'e

*Husi Eugenio Fatima Lemos*

Agrikultura hanesan bazea ida nebe importante tebes ba ita ema nia moris, tamba laiha ema ida maka iha mundu ne'e la persisa ai-han. Kuandu ita haree hosi populasau mundu nian nebe tinan-tinan aumenta ba bei-beik, no rekursu naturaiz nebe atu sustena ita ema mo'os menus ba bei-beik. Ema halo explorasaun maka'as teb-tebes ba rai hodi fo saida maka sira hakarak sai to'o haluhan tiha a'an.

Nasaun bo-bo'ot sira nebe iha osan barak sira uza sira nia forsa hodi desenvolve bisnis pribadu hodi halo osan barak ba sira nia an. Sira uza teknologia modernu bo'ot hodi halo kriasaun animal ho produs hahan nebe skala bo'ot, no teknologia sira ne'e maka dala barak maka fo inpakto negativu ba meu ambiente. Kompania sira ne'e hanoin lo'os deit oinsa atu hetan osan lalais, ne'be sira koko hodi produs no hodi halo riku basar bo-bo'ot sira. Ho ambisi ne'be bo'ot halo sira hanoin badak deit, tamba ne'e maka dala barak sira halo a'at barak liu duke halo diak.

Kazu sira hanesan ne'e agora dau-daun komesa mosu ona iha Timor Lorosa'e. Depois de akontesemento nebe akontese iha Timor Lorosa'e, Militar Indonesia ho Milisia sira estraga no naok hotu sasan ho rikusoin hotu, halo ema barak maka hanoin perguntas bo'ot katak oinsa maka ita bele produs hahan lalais hodi fo han no sustenta populasau Timor Lorosa'e nebe 800.000, ho kuantidade ida ne'e sai to'o dala barak ita la entrese ona kona ba diak ka a'at, sustenabilidade ka lae. Iha okupasaun Indonesia, agrikultur sira barak maka toman ona uza sasan sira nebe mesak karun ho ita rasik labele halo rasik no mai hosi fatin, hanesan trator, adubus kemiko, fini hibrida, pestisida no aimoruk kemiko sira seluk tan. Buat hirak ne'e halo ita nia agrikultur sira sai depende maka'as

ba buat hirak ne'e, iha tempo organizasaun non governmental sira tun ba iha bazea koalia ho agrikultur sira kona ba problema agrikultura, agrikultur sira sempre hatu sira nia difikuldade barak, hanesan la-ih trator, adubus kemiko, pestisida kimiko, fini no sira seluk tan. Departementu agrikultura liu hosi guvernun Timor hetan ajudas hosi Banko Mundial, hodi importa sasan ho folin mesak karun, nebe so par kria deit dependementu bo'ot nebe sei hotu iha tempo misaun Nasaun Unidas nia iha Timor Lorosa'e. Stadu tranzisaun la studa uluk kona ba methodu tradisional agrikultura, kondisaun rai, be'e, no mos topografi Timor Lorosa'e nian, sira importa traktor, adubus kemiko, pestisida kemiko ho fini hibrida nebe mesak oin-oin deit.

Iha parte ida ita tenke fo ita nia obrigado bararak tamba sira bele ajuda ita, maibe iha parte seluk, sira nia methodu ne'e la eduka povu sira atu fo saida maka sira hakarak hodi sai hanesan povu independenti total. Traktor ho ekipamentu agrikultur nebe sira fo ba ita, ne'e persisa osan barak hodi kuidadu sira, no tenke sosa fkan fali kuandu sira a'at ona. Fini hibrida sira nebe maka ita simu ne'e ita labele uza tan ona hodi kuda fila fali iha tempo kuda tuir mai, maski produs barak maibe sira bele produs dala ida deit iha tinan ida, tinan tuir mai ita tenke sosa fila fali. Hakarak ka lakohi ida ne'e maka situasaun aktual nebe ita hasoru iha Timor Lorosa'e agora dau-daun.

Agora UNTAET ho organizasaun Internasional sira barak maka sei fo ajuda ba ita, maibe ita seidauk hatene iha nebe maka ita bele hetan ajuda dala ida tan hosi halo ita nia Nasaun sai hanesan Nasaun nebe ukun an rasik duni. Ka ita nia guvernun tenke ba debe osan iha Komunitade Internasional hodi sosa ekupamentu sira ne'e? Ita hotu hatene

## Komparasaun Kona Ba Agrikultura

Anorgainik	Rejultado	Organik	Rejultado
Trator	Servisu lalais, maibe karun, persisa mina, oli hodi bele halai, persisa mantein, kondotor tenke treino diak.	Animal karau	Servisu neineik, maibe baratu, han du'ut deit, ten halo rai bokur, nunka a'at, bele oan.
Adubus kemiko	Karun, estraga meu ambiente, kualidade be'e, rai sai depende maka'as.	Adubus organik	La sosa, uza deit rekursu lokal ho karau nia ten, diak ba rai no meu ambiente.
Pestisida kemiko	Karun, estraga meu ambiente, kualidade be'e.	Pestisida organik	La sosa, halo deit hosi ai-tahan ho ai-abut sira.
Fini hibrida	Fo produs barak, maibe folin karun, estraga fini local, la tahan moris, la bele kuda fali iha tempo tuir mai.	Fini local	Persisa tempu, ita bele seleksi rasik, tahan moris, bele kuda fali hosi tempo ba tempo.
Ema tekniko	Lori matenek kona ba tekniku modernu, gasta osan barak hodi bele hatene, dala barak suzar atu servisu ho agrikultur sira	To'os nain	Treino simples, la persisa tempo naruk, la hatene barak kona ba tekniku modernu, maibe sira kreativu liu kona ba praktika atu uza rekeza local

katak Timor Lorosa'e iha rikeza naturais (mineral) barak tebes, hanesan gas, mina rai, marmer ho sira seluk tan, maibe buat hirak ne'e sei hotu iha tempo ida. Tamba ida ne'e maka agrikultura hanesan bazea ida nebe ita tenke mantein nafaten atu hodi antisipa ita nia ita nia rekeza naturais sira seluk. Komesa agora ita tenke komesa hanoin ona kona ba sistema agrikultura saida maka diak, nebe par ho kultura, konsisaun rai, be'e iklim no mos topografi Timor nian. No mos sistema ne'e tenke sustentabilidade. Selae kuando ita uza sistema arbiru deit ita sei estraga hotu rai nia bokur, kualidade be'e mos a'at to'o ikus ita tenke sai depende deit ona ba ema seluk, hanesan esperensia nebe maka akontese iha fatin barak ona iha mundu ne'e. Tamba se ita la kuidadu iha tempo ida maka ita nia rikeza natural (mineral) hotu ona, rai ho be'e nia kualidade mos a'at hotu. Oinsa kona ba ita nia oan ho bei-oan sira, sira atu rona estoria kona Timor nia riku deit ka.

Komesa agora ita hahu atu hatene uluk ita nia rai, hodi identifika rekursu saida deit maka ita iha (laos deit gas mineral), maibe saida deit maka iha rai laran ne'e ita tenke hatene hotu hanesan:

### **Rekursu naturaiz**

Timor Lorosa'e iha rikeza natural barak, nebe ita bele uza hodi halo kriasaun animal no mos kriasaun agrikultura sira seluk. Ita iha rai nebe tebes luan, bokur nebe ita bele uza ba kriasaun agrikultura, hanesan ai-laran, be'e, iha variaun animal barak, ho ikan (tasi ho rai maran nian), plantasaun mesak bo-boot, no mos produzaun aifuan maka'as.

Oinsa maka ita bele maneja buat hirak ne'e hatu atu bele fohan to'o ba ita nia populaun tomak. Ita bele halo rasik ita nia adubus organik rasik nebe kahur rekeza natural hanesan aitan, duut, animal nia ten ho sira seluk tan. Ita mos bele halo rasik ita nia pestisida organik rasik nebe uza rekeza natural mos, nebe mai hosi aitahn, ai-abut, aimuzan ho sira seluk tan. Iha opsau barak tebe-tebes maka ita bele halo, agora fila fali ba ita ida-idak nia an.

### **Rekursu humanus**

Ita iha ema, maski ema nebe iha edukasaun formal la barak, ita tenke respeito mos sira nia matenek nebe sira iha. Agrikultur Timor oan sira barak maka moris no hela iha sira nia rai kleur ona, agrikultur sira hatene barak liu kona ba sira nia rai, liu fali ema sira nebe iha universidade. Ita persisa rekoinese matenek sira nebe maka ita iha tiha ona, maibe ita mos tenke iha ema nebe hetan treino maka'as. Ita tenke hari redi entre agrikultur sira iha rural area iha Timor LoroSa'e hamutuk ho ema tekniku sira hodi bele aprende malu ka fahe experensia ba malu.

### **Iklima**

Ita iha iklim diak, nebe iha tempo rua maka tempo udan ho bai-loro, ita la konfujaun hanesan nasaun sira seluk nebe iha iklim to'o ha'at (4), agora maka tenke hatene oinsa ita bele adapta di-diak ba ita nia iklim atu nune ita bele hetan hahan to'o tinan bai-loro. se lae ita hein lo'os deit to'o tempo

udan maka ita foin kuda hahan hanesan batar, aifarina, lakeru, fore no mos sira seluk tan.

### **Topografi**

Timor Lorosa'e maioria foho ho rai lolon maka barak, ita tenke buka sistema ida atu oinsa bele proteza rai hosi eruzau. Se ita halo kriasaun agrikultura ladun diak hanesan uza sasan kemiko sira no tesi ai ho sunu rai maka'as hodi halo to'os, foti ai-maran no hodi kasa aimal fuik sira, maka to'o udan bo'ot tu'un mai sei halo rai sira ne'e monu hotu, to'o loron ida parese ita nia foho sei sai lakon hotu.

Ho topografi ida hanesan ne'e iha realidade katak ekipamentu hanesan trator suzar tebe-tebes atu ita uza iha rai lolon ka foho leten, ita uza diak so iha rai nebe tetuk deit. Mos kuando ita uza sasan kemiko sira ba rai ladu'un fo inpakto diak ba meka anviente, tamba sira labele lakon deit iha rai laran, maibe sei tama iha prosesu hahan nian suli tu'un ba rai laran kahur malu ho be'e mo'os, sai ba iha be'e matan, tama iha be'e posu, kahur ho be'e mota to'o ikus ba liu tasi laran.

Kuadu se ita uza sasan kemiko sira kleur bele halo rai nia bokur lakon hotu, no ita labele uza tan ona. Sasan kemiko sira mos oho mate hotu insekta sira nebe bele halo balansia ekosiste. Se ita analiza didiak katak ita sei hetan nia final katak fila fali mai ita. Tamba laiha iha ema ida maka iha Timor LoroSa'e hahan ho be'e mai deit hosi loja ka supermarket, ema barak maka hemu be'e hosi mota, posu, be'e matan no hetan hahan hosi rai ho be'e laran, se mak ita komesa uza ona sasan kimiko ba ita rai, ne'e hanesan ita komesa tau beneno ba ita nia an rasik no komesa hahu haluhan ita nia oan ho bei oan sira nia futuro ba aban bai rua.

Iha resaun barak lo'os atu hataten katak tamba saida maka agrikultura anorganik ho uza ekipamento sira. Agrikultur nebe uza pestisida ho traktor sira bele produs kuatidade hahan barak, no sira bele halo ho lalais. Mos ema, animal ho forsa halo agrikultur sira hakarak uza makina. Finalidade katak agrikultur sira nebe uza fini hibrida no pestisida sira la depende lo'os deit ba iklim ho insekta ba sira nia moris. Biar han uza mos buat hirak ne'e iha mos efek negativu no persisa gasta osan barak, hodi halo buat hirak ne'e Timor Lorosa'e tenke impresta osan. Hakarak ita komesa ita nia Nasaun moris ho debe ka, ka hanesan nasaun nebe bele sustenta rasik nia an ho fohan nia povu hosi nia rekeza, ho prosus hahan ho kualidade. Ita tenke hanoin mos kona ba folin laos kona deit ba osan, no mos folin ba ita nia saude ho saude ba ita nia rai. Lolos ne'e ita lalika husu makina, fini hibrida ho sasan kimiko sira ne'e, tamba buat sira ne'e ita hanoin badak deit la hanoin naruk. Ba rasaun ida ne'e, ita tenke selektivu no hanoin kuidadu kona ba efek hosi ita nia sistema ba nebe implementa ba rai, ba be'e no mos ita nia an rasik. ❖

---

*Eugenio Fatima Lemos (Ego) servisu ho Permakultura Timor Lorosa'e, organizaun local nebe promove agrikultura nebe susteinabel.*

## Berita Singkat...

**Pada tanggal 7 Desember 2001, LSM-LSM nasional, internasional dan para keluarga korban memperingati Hari Invasi (Invasion Day), hari ketika Indonesia menginvasi Timor Lorosa'e tahun 1975, di taman Fransisco Borax, Dili.** Peringatan ini meliputi pidato, teater, pameran foto, penaburan bunga di pelabuhan Dili dan pertunjukan film tentang perjuangan Timor Lorosa'e. Pada pertemuan itu, keluarga-keluarga para korban menyerukan agar membawa mereka yang terlibat dalam kampanye teror, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan ke pengadilan. Ny. Domingas Pereira, seorang wakil dari keluarga-keluarga korban, menuntut kepada pemerintah Timor Lorosa'e agar menjadikan program pengadilan sebagai prioritas karena 'belum ada keadilan di Timor Lorosa'e. Kami butuh keadilan karena kami kehilangan keluarga-keluarga kami dalam perang ini.'

**Pada tanggal 10 Desember 2001 (Hari Hak-Hak Asasi Manusia Internasional) ada Seminari susteran Canossian di Becora, Dili, diadakan sebuah dialog antara Deputi Administrator Transisi Dennis McNamara, Wakil Menteri Kehakiman Domingos Sarmento, Juru Bicara Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Jacinto alves dan sekitar dua ratus keluarga korban tahun 1999.** Para keluarga korban meminta UNTAET dan, terutama, Unit Kejahatan berat untuk meneliti kasus-kasus keadilan di Timor Lorosa'e. Banyak dari mereka meminta untuk mendirikan sebuah pengadilan internasional.

**12 Desember 2001, Majelis Konstituente memutuskan untuk tidak memasukkan 'orientasi seksual' kedalam Pasal 16 Undang-undang Dasar, sebuah pasal yang melarang diskriminasi.** Sehingga pasal yang diterima berbunyi 'Tidak ada orang yang boleh didiskriminasi karena warna kulit, ras, jenis kelamin, status perkawinan, asal-usul etnis, status sosial dan ekonomi, keyakinan politik atau ideologi, agama, pendidikan, dan kondisi fisik dan mental.' Milena Pires (PSD), Mariano Sabino (PD), Francisco Branco (Fretilin) dan Aderito Soares (Fretilin) adalah para advokat vokal yang ingin memasukkan 'orientasi seksual' itu. Walaupun demikian, 52 dari 88 anggota Majelis Konstituente memberikan suara menolak memasukkan istilah tersebut. Satu dari sejumlah penentang vokal adalah João Carrascalão (UDT), yang menghubungkan homoseksualitas sebagai suatu 'penyakit' dan 'kelainan', dan ia berargumentasi bahwa memasukkan istilah itu akan menciptakan 'kekacau-balauan sosial'. Seorang utusan lain mengklaim tidak perlu memasukkan istilah itu karena 'homoseksual hanya ada di tempat-tempat lain; di Timor Lorosa'e tidak ada homoseksual.'

*Komentar La'o Hamutuk: Timor Lorosa'e harus melindungi hak-hak asasi setiap orang. Pemerintah di masa depan harus membuat peraturan yang secara jelas dan keras melarang diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, orientasi seksual, etnis atau kategori apapun yang berhubungan dengan sosial, ekonomi atau agama.*

Pada tahun 2001, sebelas orang dari LSM lokal mempelajari pergerakan sosial dan pendidikan kerakyatan (*educasaun popular*) di Brasil selama sebulan. 'Pendidikan kerakyatan' menunjuk kepada suatu filsafat pengorganisasian masyarakat dimana setiap orang adalah guru sekaligus murid, yang bekerja bersama bagi keadilan sosial dan kebebasan dari eksploitasi. Dari pengalaman ini di Brasil, kelompok itu membentuk *Jaringan Pendidik Populer Timor Lorosa'e*, yang dalam bahasa Tetum disebut sebagai 'Dai Populer'. **Dari 13-15 Januari 2002, hampir 20 organisasi Timor Lorosa'e bertemu untuk memperkuat dan memformalkan kerja Dai Populer.** Mereka mendiskusikan prinsip-prinsip pendidikan kerakyatan dan juga strategi yang konkrit untuk mengembangkan Program Masyarakat buta Aksara, program kesehatan dan ekonomi yang menguntungkan rakyat pada tingkat bawah (masyarakat madani), termasuk klinik buta aksara, koperasi masyarakat, pengembangan obat tradisional dan pariwisata alam (*ecoturisme*). Untuk tahun ini, Dai Populer mempunyai tiga tujuan utama: 1) membangun sebuah pusat sumberdaya dan sekretariat; 2) memfasilitasi pertukaran antara anggota-anggota organisasi yang sedang melakukan pekerjaan pendidikan kerakyatan di seluruh Timor Lorosa'e; dan 3) memfasilitasi pertukaran antar organisasi-organisasi di Timor Lorosa'e dengan organisasi-organisasi di negara-negara lain yang berkaitan dengan pendidikan kerakyatan.



*Dai Populer: Joana Dias dari Klinik PAS membagi informasi tentang teknik obat tradisional di Brazil.*

**Pada 8 Januari, Ketua Staf UNTAET Nagalingam Parameswaran (Param) mengundurkan diri, dua hari sebelum masa kontraknya habis (kontrak itu belum pernah diperbarui).** Param, seorang diplomat Malaysia, merupakan pegawai sipil UNTAET pada tingkat ketiga. *La' o Hamutuk* dan pihak-pihak lain telah mengkritik pendekatannya yang lembut terhadap Indonesia dan hubungannya yang intim dengan para pemimpin milisi dan pejabat-pejabat TNI, terutama dalam isu-isu pemulangan pengungsi dan keadilan. Diplomat yang ramah ini tidak mengundurkan diri secara diam-diam, tetapi melancarkan tuduhan rasisme terhadap UNTAET (yang dia sebut 'sebuah misi 'putih', sebuah misi timur dengan wajah-wajah barat') dalam sebuah surat bernada pahit kepada Sekretaris Umum PBB Kofi Annan. Meskipun UNTAET dan para pemimpin Timor Lorosa'e menyangkal keras tuduhannya tentang rasisme, yang banyak mengkhawatirkan komposisi pada jajaran pejabat tingkat atas dari misi itu, mereka juga membela prestasi mantan kolega mereka itu.

**Pada tanggal 12 Januari, para komisaris dari Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah lama dijanjikan akhirnya disumpah.** Ketujuh komisaris itu termasuk dua anggota perempuan (kurang dari 30% dari syarat legal CRTR). Para komisaris terdiri dari para pemimpin gereja, LSM dan kelompok-kelompok perempuan, termasuk mantan anggota Dewan Pengurus *La' o Hamutuk* Fr. Jovito Araujo, Direktur Eksekutif Yayasan HAK Aniceto Guterres Lopes, Direktur ET-WAVE Olandina Caeiro, dan Rev. Agostinho de Vasconcelos yang diusulkan oleh para pemimpin milisi di Timor Barat. Pada tanggal 4 Februari, CRTR memilih Aniceto sebagai ketua dan Pe. Juvito sebagai wakil ketua. CRTR akan mengambil kesaksian terhadap kekerasan dari 1974 sampai dengan 1999, dan menentukan pemulihan hukuman kepada mereka yang mengakui melakukan kejahatan-kejahatan ringan pada tahun 1999. CRTR tidak dapat memberikan pengampunan (amnesti) kepada kejahatan-kejahatan berat, tetapi akan menyerahkan mereka kepada para jaksa untuk dituntut melalui sistem pengadilan. Untuk informasi lebih lanjut tentang CRTR, lihat *Buletin La' o Hamutuk* Vol. 2 No. 6-7.

Para penduduk yang tinggal dekat pusat Transportasi/Logistik UNTAET di Mascarenas, Dili mengkhawatirkan rembesan oli motor dan sampah kedalam selokan pembuangan air di sekitarnya. **Pada awal Januari, aliran oli motor yang terus menerus mengubah selokan yang berjajar sepanjang pagar di Dili tengah itu menjadi kotor, hitam dan beracun, terlihat bersama-sama dengan filter oli yang dibuang.** Meliana Luruk, seorang penduduk di tempat itu, mengeluh bau dari selokan yang sangat mengganggu dan menyebabkannya sakit. Seorang penduduk lain, Fransisco Freitas Moreira, khawatir oli akan mencemari tanah disekitarnya, sehingga mengakibatkan tanah tidak cocok untuk ditanami jagung. Hujan lebat membawa kotoran itu melalui sistem saluran pembuangan di Mascarena, mencemari selokan-selokan sepanjang saluran. Para penduduk khususnya khawatir terhadap oli yang terhanyut ke laut yang jaraknya sekitar satu kilometer dari situ dan akan merusak lingkungan laut.

UNTAET merekomendasikan agar masyarakat menyimpan oli mesin bekas mereka sampai adanya suatu sistem pembuangan yang memadai. Ketika *La' o Hamutuk* menghubungi bagian Transportasi UNTAET pada pertengahan Januari tentang masalah itu, kami diberitahukan bahwa sebuah perusahaan swasta mengumpulkan dan membuang oli bekas UNTAET, dan bahwa metode pembuangan yang tidak tepat di Mascarenas akan diteliti. Sejak saat itu, banyak filter oli bekas telah diambil, dan terlihat adanya perbaikan pada kondisi selokan-selokan itu. Walaupun demikian, kerusakan yang disebabkan oleh oli masih kelihatan dalam bentuk bercak-bercak hitam pada dan disekitar selokan, dan masih ada sejumlah kecil bagian-bagian mesin bekas yang terlihat didalam selokan sepanjang tembok pusat Transportasi.

Komentar *La' o Hamutuk*: *Meskipun pembuangan atau daur-ulang oli motor mungkin bukan prioritas UNTAET, kasus yang egregious ini bukan hanya karena kuantitas oli, tetapi juga karena pengaruh-pengaruh jangka pendek (belum lagi jangka panjang) terhadap lingkungan setempat dan penduduknya. UNTAET, berilah contoh yang baik!* ❖

# Reportajem Husi Konferensia Doadores iha Oslo

Timor Lorosa'e nebe moris iha kolonial Portugis ho rezim okupasaun Indonesia nia okos, susar teb-tebes atu dezenvolve ninia an. Iha kolonialismu Portugis nia okos la iha oportunidade ba povo Timor atu dezenvolve sira nia ekonomia, agrikultura, demokrasia, justica, edukasaun no saudi. Iha Indonesia nia okos, Timor Lorosa'e komesa dezenvolve iha sektor hot-hotu maibe iha area direitus humanus no justisa, situasaun sai a'at liu. Prosesu hirak ne'e la'o iha tinan 24 nia laran. Depois iha tinan 1999, molok no depois referendum, milisia nebe hetan suporta hosi TNI totalmente estraga buat hirak nebe mak Indonesia dezenvolve hanesan infrastruktura, edukasaun, agrikultura ho se-seluk tan. Asaun ida ne'e nia impaktu mak povu Timor tomak enfrenta difikuldade oi-oin atu komesa halo dezenvolvimentu ba ita nia objektivu atu hetan ukun rasik an.

Konferensia doadores nebe hala'o iha Oslo, Norwegia iha loron 11 to'o 12 fulan Dezembru tinan 2002, ninia objectivu mak atu halo evaluasaun hare nia progresu to'o iha nebe no identifika prioridade dezenvolvimentu Timor. Iha konferensia ne'e, doadores sira buka vizaun ba oinsa fo suporta rekursu humanu, material no orsamentu ba dezenvolvimentu Timor nian. Asuntu nebe mak sira levanta iha ne'e, mak hanesan kestaun perparasaun Timor Lorosa'e ba ukun rasik an. Partisipantes internasional iha konferensia ne'e inkluye Sekretariu Geral Nasaus Unidus Kofi Annan, Ulun Bo'ot UNTAET Sergio Vieira de Mello, no James P. Wolfensohn, Presidente Grupu Banku Mundial. Iha mos presentasaun husi Banku Mundial nia escritoriu iha Timor, Fundu Monetariu Internasional, agencias Nasaus Unidus oi-oin no husi nasaun sira nebe iha doadores ba Timor. 30 resin nasaun partisipa iha konferensia ne'e.

Atu fo vizaun kona ba oinsa dezenvolve Timor Lorosa'e ba komunidadade internasional sira nebe atu fo apoiu ba Timor, hosi Timor Lorosa'e iha grupu rua mak tuir konferensia ne'e. Grupu ida representa governu no Xefe Ministru Mari Alkatiri mak dirizi grupu ne'e. Grupu ida seluk representa sociedade sivil no liu Forum Nasional ba Organisasaun Non-Governmental (NGO Forum) hanesan Antero Benedito da Silva hosi NGO Forum, Maria Dias hosi Rede Feto ho Jesuina Soares Cabral hosi *La'o Hamutuk*. Nudar orgaun ida nebe mak representa sociedade sivil, iha konferensia ne'e ladun iha oportunidade ba representante nain tolu atu bele fo sai idias ka komentario kona ba realidade nebe akontese iha Timor Lorosa'e. Maibe sira hato'o deklarasaun nebe husu doadores fo atensaun liu tan kona ba justisa, igualidade entre mane ho feto, refujiadus, harii kapasidade ema nian, prosesu planamentu ba desenvolvimentu nasional nebe demokratiku, no prosesu orsamentu publiku nebe transparente no demokratiku. (Bele hetan deklarasaun ne'e liu *La'o Hamutuk* ka NGO Forum).

Durante tinan rua iha tranzisaun nia laran ne'e, buat barak mak nasaun doadores sira fo ona ba Timor Lorosa'e. Iha ona progressu dezenvolvimentu iha setor barak hanesan setor seguransa, governu nasional, infrastruktura, edukasaun, agrikultura, no saudi, maibe sei iha buat barak mak persiza atu hadia no halo. Iha konferensia ne, Governo Tranzisaun Timor Lorosa'e fo hatene ka halo relatorio kona ba Timor Lorosa'e nia moris durante iha sira nia liman, maibe sira koalia barak liu kona ba buat nebe positive deit, iha dezenvolvimentu ne'e lao diak, iha Timor Lorosa'e harii hotu ona fatin eskola nian, fatin ba saude, dalan kona ba transporte lao diak, no prepara harii iha ona governo ba Timor oan rasik. Prosesu kona ba fo sai informasi

mak barak liu iha deit lian Ingles no tamba ne'e, povu sira iha Timor Lorosa'e lahatene saida mak sira diskuti iha Oslo durante konferensia ne'e.

Iha konferensia ne'e, nasaun ida-idak koalia sobre Rai Timor Lorosa'e nia futuru no mos haree fali ajuda nebe doadores sira fo ona ba Timor Lorosa'e hahu iha tinan 1999-2001 no buat nebe sira atu fo ba oin. Loron ida, durante diskusaun entre doadores sira, ema ida kompara Timor Lorosa'e hanesan bebe oan ida nebe foin moris, no bebe oan ne'e presisa atu kuidadu hare didiak tamba bebe ne'e sei liu husi prosesu premeiro kakorok metin, tu'ur, dolar, la'o, depois sai labarik, joven no tuir mai bele ona responsablisa ba nia'an rasik mak depois husik.

Promesa geral husi nasaun hirak mak hanesan:

Uniaun Eropa promete atu fo tulun ba Fundu Konsolidasaun ba Timor Lorosa'e (orsamentu governu Timor foun nian) US\$9 Juta maibe sira dehan katak projektu ne'e tenke klaru no tama iha agenda planu dezenvolvimentu nasional nian. Nasaun Japan promete atu kompleta fundu nebe sira atu fo, hodi aloka fila fali US\$30 Juta ba dezenvolvimentu aktividade ekonomia, seguransa no selebrasaun loron independensia iha 20 Maiu 2002 ninian. Nasaun Portugal mak promete osan hira mak atu aloka ba rekonstrusaun Timor Lorosa'e, no dehan katak sira sei nafatin suporta fundu Timor iha tempu badak no tempu naruk ninian durante tinan tolu nia laran. Nasaun United Kingdome ka Inglatara la promete buat ida maibe dehan katak sira sei suporta rekonstrusaun no dezenvolvimentu Timor iha tempu badak no tempu naruk nian. Nasaun Chili hakarak ajuda Timor iha oin atu haruka ninia ema matenek/pakar atu ajuda hodi halo dezenvolve Timor oan sira nia kapasidade. Nasaun Finlandia la promete buat ida maibe dehan katak hakarak atu azuda dezenvolve rekursu humanu iha Timor. Frances hatudu ninia intensaun atu suporta Timor iha area treinu ba diplomata, edukasaun (suporta estudante sira nebe kontinua sira nia estudus iha Indonesia) no aktividade ekonomia iha Dili mos iha distrito hot-hotu. Frances mos dehan katak 25% hosi sira nia kontribusaun atu suporta aktividade ka dezenvolvimentu feto nian ho feto nia partisipasaun iha planiamentu orsamentu ba funsionario sira. Soedia hatudu sira nia hakarak atu suporta relasaun diak entre Indonesia ho Timor Lorosa'e nebe nasaun rua ne'e serbisu hamutuk iha area justisa no rekonsiliaun. Australia promete atu sei kontinua suporta Timor Lorosa'e ho aloka osan ba dezenvolvimentu kapasidade ninian. Estados Unidus hatudu sira nia hakarak atu suporta nafatin sira nia asistensia ba iha prosesu Timor ukun rasik an.

Nasaun barak mak sei hateten sira nia hakarak atu suporta rekonstrusaun no dezenvolvimentu Timor Lorosa'e nian. Ita tenke haree didiak sira nia asistensia iha futuru no depois Timor nia tranzisaun ba Ukun rasik an. Ita bele dehan katak nasaun doadores sira uluk fo apoiu ba Indonesia nia okupasaun iha Timor Lorosa'e no agora doadores iha responsabilidade bo'ot atu hadia fali Timor Lorosa'e ninia dezenvolvimentu nebe estraga tiha ona, laos izmola deit ka hare tamba sira nia laran luak atu tulun. Nasaun doadores tenke iha komitmen atu ajuda ba ukun rasik an nebe tuir ema Timor nia hakarak. Komunidadade internasional tenke fo apoiu ba buat hotu ne'e no suporta partisipasaun ema Timor hotu iha dezisaun kona ba asistensia husi doadores sira no rona povo nia hakarak husi ulun bo'ot Timor nian no mos husi povo ki'ik sira. Ema Timor oan tomak mak luta makaas ba ukun rasik an ne'e bo'ot no todan teb-tebes, no sira hotu tenke bele partisipa iha rai klaran ne'e. ❖

## Mengapa Menolak Pasukan Bela Diri Jepang? *(Dari halaman 16)*

diselenggarakan oleh kalangan pegiat hak asasi manusia. Pengadilan yang sama dalam sidangnya di Den Haag (Negeri Belanda) awal Desember 2001 memutuskan bahwa almarhum Kaisar Hirohito dan para pejabat tinggi pemerintah Jepang lainnya dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menerapkan praktek jugun ianfu. Vonis yang tidak mengikat secara hukum itu merupakan sebuah desakan terhadap pemerintah Jepang untuk meminta maaf kepada para korban dan membayar ganti rugi. Media berita yang besar dan pemerintah Jepang mendiamkan keputusan tersebut tanpa memberikan satu komentar pun.

Bagi rakyat Timor Lorosa'e, pemerintah Jepang telah menggoreskan noda hitam dalam sejarah perjuangan Timor Lorosa'e. Selama 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor Lorosa'e, pemerintah Jepang selama delapan kali menentang resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, yang berarti Jepang adalah 'pendukung setia' Indonesia. Dalam pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991, truk-truk Hino buatan Jepang digunakan tentara Indonesia untuk mengangkut mayat-mayat pemuda dan pemudi yang dibantai.

Bagaimanapun, kecenderungannya pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke Timor Lorosa'e akan tetap dilakukan. Pejabat pemerintah transisi seperti Ketua Dewan Menteri Marí Alkatiri ketika melakukan lawatannya ke luar negeri menyambut baik kedatangan mereka. Ramos Horta lebih khusus mengatakan protes yang dilakukan 12 NGO tidak mewakili aspirasi rakyat Timor Lorosa'e. Pernyataan tersebut semakin dipertegas pimpinan delegasi Jepang Fumio Kyuma yang mengatakan bahwa meskipun sebagian organisasi non-pemerintah Timor Lorosa'e menentang kehadiran militer Jepang di Timor Lorosa'e, namun pendapat mereka tidak mewakili sebagian besar warga. (*Tais Timor*, edisi Oktober 2001). Pernyataan tersebut

sangat mengejutkan, karena surat pernyataan protes yang diajukan organisasi-organisasi non-pemerintah itu belum mendapat tanggapan dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang ternyata hanya ingin bertemu dengan pemimpin Timor Lorosa'e. Padahal kita mengetahui bahwa tuntutan keadilan adalah berasal dari rakyat kecil.

Untuk saat ini, pengiriman tentara boleh dikatakan terlambat. Seharusnya pengiriman tentara Jepang dilakukan sebelum Referendum 30 Agustus 1999 karena pada saat itu rakyat Timor Lorosa'e sangat membutuhkan kehadiran pasukan keamanan untuk mengamankan mereka dari kekerasan milisi anti-kemerdekaan. Pertanyaannya, mengapa baru sekarang pemerintah Jepang baru mengirimkan tentaranya? Jika tugas mereka adalah untuk membangun jalan raya, seharusnya yang dikirim adalah pekerja dan insinyur. Jika pemerintah Jepang ingin membantu Timor Lorosa'e maka yang harus diperhatikan adalah masalah-masalah yang dihadapi rakyat, seperti ngangguran dan kelangkaan pelayanan dasar. Jangan sampai dana untuk rakyat Timor Lorosa'e akan kembali ke Jepang karena bantuan tersebut digunakan untuk membiayai tentaranya sendiri.

Akhir kata, permintaan maaf dan pertanggungjawaban pemerintah Jepang bukan hanya untuk pendudukan Jepang saat Perang Dunia Kedua, tetapi juga untuk dukungan pemerintah Jepang selama 24 tahun kepada Indonesia yang telah mengorbankan ratusan ribu rakyat Timor Lorosa'e. Hanya tindakan seperti itulah yang akan mampu membangun hubungan bilateral yang erat antara Timor Lorosa'e dan Jepang. Timor Lorosa'e membutuhkan bantuan dana dan merupakan satu keharusan bagi pemerintah Jepang untuk membangun kembali Timor Lorosa'e yang hancur. ❖

*Nuno Rodrigues adalah direktor Sa'he Institute for Liberation dan anggota Dewan Penasehat La'o Hamutuk.*

---

## Siapa itu La'o Hamutuk?

**Staf Orang Timor:** Inês Martins, Thomas (Ató) Freitas, Mericio (Akara) Juvenal, Adriano Nascimento, Jesuina (Delly) Soares Cabral

**Staf Internasional:** Pamela Sexton, Vijaya Joshi, Charles Scheiner, Andrew de Sousa

**Penggambar:** Sebastião Pedro da Silva

**Penerjemah:** José M.C. Belo, Hilmar Farid, Djoni Ferdiwijaya

**Dewan Penasehat:** Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, João Sarmento, Aderito de Jesus Soares, Carolina Maria Do Rosario

*La'o Hamutuk* bertermima kasih kepada pemerintah Finlandia yang mendukung publikasi ini.

# Mengapa Menolak Pasukan Bela Diri Jepang?

*Oleh Nuno Rodrigues*

Ketika 12 NGO menentang pengiriman tentara Jepang pada tahun lalu Menteri Luar Negeri José Ramos Horta mengatakan agar NGO tidak mencampuri urusan luar negeri dan memberikan tanggungjawab tersebut kepada pemerintah transisi. Secara tegas, Ramos Horta mengatakan, 'Setelah Timor Lorosa'e merdeka penuh tahun depan Timor Lorosa'e tidak akan mengungkit-ungkit kebijakan masa lalu pemerintah Jepang di tahun 1942-1945 dalam Perang Dunia Kedua ...' (*Suara Timor Lorosa'e*, 24/8/2001).

Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpedulian para pemimpin politik untuk menegakkan keadilan di Timor Lorosa'e berkaitan dengan pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945. Saat ini Jepang menjadi negara donor terbesar bagi rekonstruksi Timor Lorosa'e. Untuk bantuan kemanusiaan pada masa darurat (emergency) pemerintah Jepang mengeluarkan dana sebesar US \$34,3 juta. Sementara untuk rekonstruksi Timor Lorosa'e Jepang telah menawarkan US \$100 untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun.

Kelompok NGO meminta agar sebelum mengirimkah tentara (yang nama resminya adalah Pasukan Bela Diri), pemerintah Jepang terlebih dahulu meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada rakyat Timor Lorosa'e yang menjadi korban perbuatan tentaranya selama tiga tahun. Selama pendudukan itu, rakyat Timor Lorosa'e menjadi korban kekejaman tentara Jepang. Banyak yang menjadi pekerja paksa (romusha) dan budak seks (jugun ianfu) yang dipaksa untuk melayani anggota-anggota tentara Jepang.

'Kerja paksa, laki-laki, perempuan dan anak-anak dipaksa untuk membangun jalan raya dari Hau melalui Oli, Kai, Ualele, Uato-Lari, Nunumalau, Haunau, Aedere, Lhare ke Baguia. Tidak ada pakaian dan makanan. Banyak orang mati. Ketika kami mendapat makanan, tentara Jepang mengambilnya dari kami dan membiarkan kami menonton mereka makan. Tentara Jepang sangatlah kejam,' kata Maurubi, 80 tahun, salah seorang korban. Untuk melayani anggota tentara yang bertugas, Jepang membangun rumah-rumah besar dan memaksa perempuan untuk menjadi jugun ianfu. Uato-Binaro di Uato-Lari adalah salah satu pusat jugun ianfu. (Sumber: wawancara Antero Bendito Silva).

Tak banyak yang mengetahui bahwa 40.000 penduduk Timor Lorosa'e terbunuh selama tiga tahun pendudukan Jepang. Ribuan orang bekerja paksa, diharuskan menjadi Romusha dan ribuan perempuan menjadi jugun ianfu (arti harafiahnya adalah perempuan penghibur tentara, mereka diharuskan memberikan pelayanan seksual kepada anggota tentara Jepang). Bukti kekejaman tentara Jepang dapat dikumpulkan melalui saksi-saksi yang sedang menunggu kematian karena usia. Perjuangan untuk menuntut keadilan

telah dimulai pada zaman pendudukan Indonesia. Walaupun belum mencakup seluruh Timor Lorosa'e karena ketatnya pengawasan oleh tentara Indonesia, Forum Pusat Komunikasi Ex-Romusha dan Jugun Ianfu Lorosa'e berhasil mengidentifikasi 3450 orang korban pendudukan Jepang, yang 800 orang di antaranya adalah jugun ianfu.

Pada forum-forum internasional, beberapa kali para korban kekejaman Jepang di Timor Lorosa'e mengikuti pertemuan-pertemuan untuk memberikan kesaksian. Pada bulan Desember 2000 dua perempuan Timor Lorosa'e memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka sebagai budak seks tentara Jepang kepada Pengadilan Internasional Kejahatan Perang tidak resmi yang

*(Melanjutkan di halaman 15)*

## Apa itu La'o Hamutuk?

*La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi gabungan Timor Lorosa'e–Internasional yang memantau, menganalisa dan melapor tentang kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa masyarakat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses merekonstruksi atau pembangunan dan proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat Timor Lorosa'e yang efektif dalam merekonstruksi dan membangun negara ini. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk memperbaiki komunikasi antara komunitas internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik staf lokal maupun internasional mempunyai tanggung jawab yang sama dan memperoleh gaji dan keuntungan yang sama. Akhirnya, *La'o Hamutuk* menjadi pusat informasi dengan menyediakan berbagai bacaan tentang model pembangunan, pengalaman dan hasil praktek dan juga memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model pembangunan alternatif.

*Dengan dorongan semangat transparansi yang kuat, La'o Hamutuk mengharapkan anda untuk menghubungi kami jika anda mempunyai naskah-naskah dan atau informasi yang harus dibawakan pada perhatian masyarakat Timor Lorosa'e dan juga masyarakat internasional.*